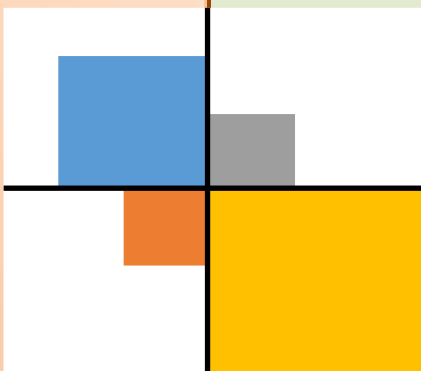


# LKPJ DAN LPPD

## TAHUN 2019



**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2019**



---

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 ini disusun Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan, muatan, format dan data pendukung LKPJ – LPPD, mengacu pada PP Nomor 3 tahun 2007.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang di dalamnya menggambarkan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan, laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan, Tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Demikian Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana pembangunan kedepan. Namun tetap disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pelaihari, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tanah laut,

Ir. Nor Hidayat  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630824 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial .....	1
a. Struktur Organisasi .....	2
b. Kepegawaian (menggambarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana tabel terlampir) .....	5
c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan .....	6
d. Data Statistik ( disajikan data spesifik sebagai gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggung jawab SKPD dengan dilengkapi narasi singkat, tabel masing masing SKPD terlampir) .....	6
BAB II    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....	10
2.1 Urusan wajib .....	10
a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan .....	11
b. Program dan Kegiatan .....	13
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	15
d. Permasalahan dan Solusi .....	16
2.2 Urusan Pilihan .....	16
2.3 Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Daerah .....	16
2.4 Urusan Pemerintahan Umum .....	16
BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	17
3.1 Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/Provinsi ...	17
3.2 Tugas Pembantuan yang diberikan .....	17
BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	18
4.1 Kerjasama Daerah .....	18
4.2 Koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah .....	18
4.3 Pengelolaan Kawasan Khusus .....	19
4.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	19
4.5 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	19
BAB V    PENUTUP .....	20
7.1 Kesimpulan .....	20
7.2 Saran-Saran .....	22
7.3 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan .....	22
a. Prestasi yang dicapai SKPD (disertakan fotokopi sertifikat/ foto penghargaannya) .....	22
b. Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan SKPD disertakan fotokopi sertifikat/ foto penghargaannya) .....	22



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar nama PNS Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
2. Daftar rincian Pejabat Eselonering Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
3. Daftar Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang sudah mengikuti Diklat.
4. Lampiran KIB (Kartu Inventaris Barang)
5. Lampiran Pengawasan definitive per kegiatan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dalam Tahun Anggaran 2019 ini menyusun LKPJ yng mana nomenklatur nya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut serta Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut.

### **2. GAMBARAN UMUM SKPD**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan, baik Pelayanan kepada masyarakat melalui Pembinaan, Penyuluhan dan Pendampingan pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat Otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial, yang berpedoman kepada kebijakan Pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah- masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya.

Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

#### **a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang dibantu oleh :

1) Sekretariat

2) 2 (dua) Kepala Bidang yaitu :

- a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Bertugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Bertugas memberikan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan.

2) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin



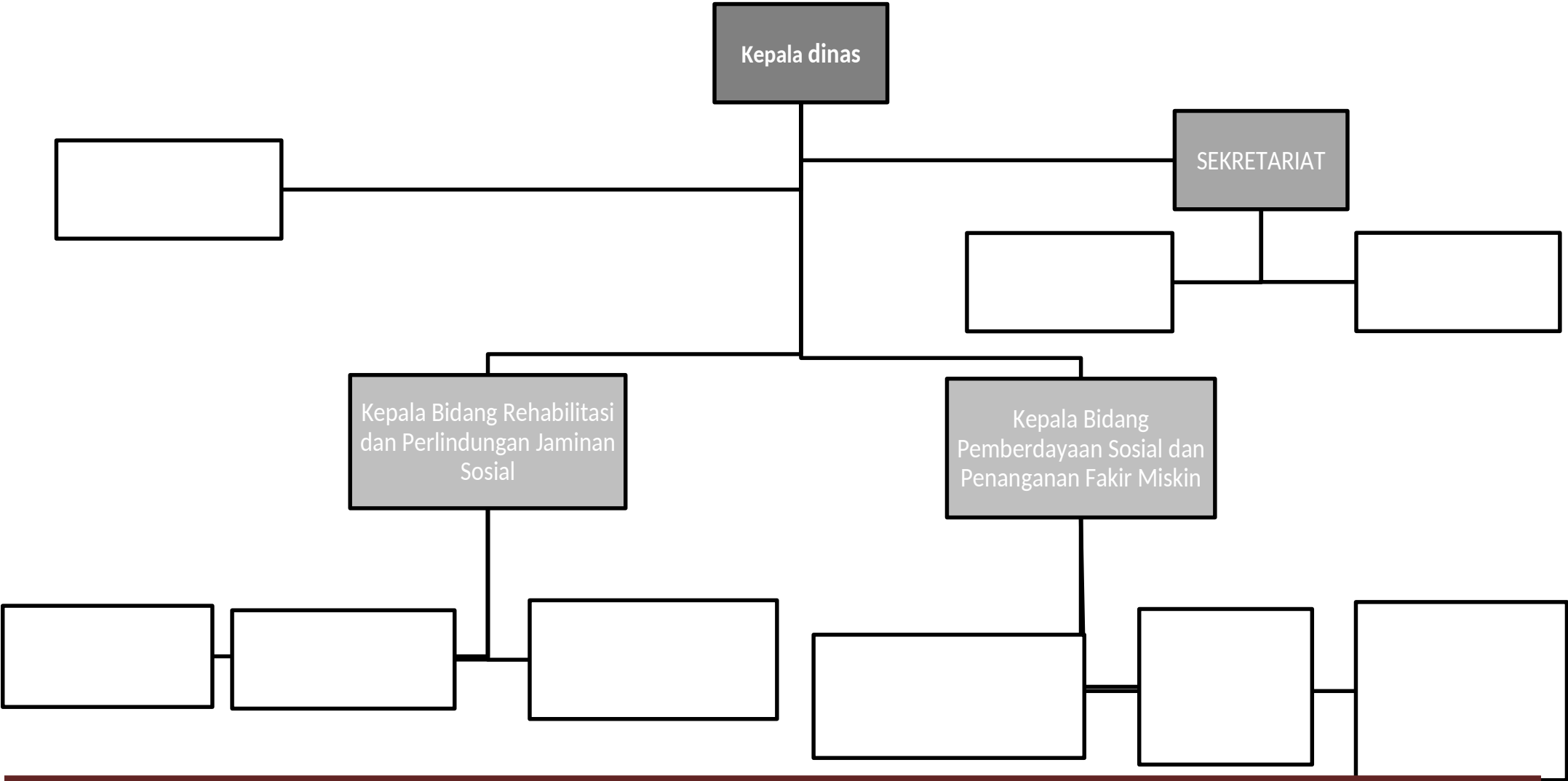
Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga ) sub seksi yaitu :

- a. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar (dibawah ini)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 2016



## b. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang PNS dan 16 (enam belas) PTT.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan**

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & PrIndngn JamSos	Jumlah
1	P N S	<b>27</b>					
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	-	1	-	1	2
	Pembina	(IV/a)	-	-	3	1	4
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	1	4
	Penata	III/c	-	-	2	2	4
	Penata Muda Tk.I	III/b		2	-	-	2
	Penata Muda	III/a			1		1
	Pengatur Tk.I	II/d	-	3	-	1	4
	Pengatur	II/c	-	-	2	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	1	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	2	-	-	2
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	Honorer Daerah	-	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	16	-	-	16

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

Tabel 2

Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	<b>P N S</b>	
	Strata 2	5
	Strata 1	11
	Diploma III/IV	-
	SMA/Sederajat	9
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>
2	<b>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	3
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

c. Kondisi Sarana dan Pra sarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2019 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayananan Dinas Sosial dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Dinas Sosial dan sepeda motor operasional untuk relawan pekerja sosial di lapangan, Adapun rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Sosial dapat dilihat pada (Lampiran) :

d. Data Statistik

Data Statistik adalah merupakan data Spesifik sebagai gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggungjawab SKPD. Kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum dikota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Pada Bulan Mei Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berganti sebutan menjadi Pemerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan sumber resmi dari Pusdatin Kementerian Sosial RI PMKS/PPKS terbagi menjadi 26 jenis (lihat tabel dibawah). Untuk diketahui bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa Program dan Kegiatan untuk menangani PMKS/PPKS (tabel bawah) :

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tabel 3  
Pencapaian indikator Persentase PMKS tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan	%	45,52	34,84	<b>100</b>
	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.	-	-	-	-

Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Tabel 3 Pencapaian indikator Persentase PMKS tahun 2019 yang mendapat pelayanan sosial terealisasi sebesar **45,52 %** dari target **34,84%** sehingga capaian Persentase PMKS tahun 2019 yang mendapat pelayanan sosial telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Kabupaten tanah Laut tidak hanya menggunakan dana APBD II, tetapi juga menggunakan dana dari APBD I Provinsi Kalimantan Selatan dan dana APBN dari Kementerian Sosial.

$$\% \text{ PMKS} = \left( \frac{\sum \text{PMKS yang ditangani}}{\text{PMKS Se Kab. Tala}} \right) \times 100 \%$$

$$= \frac{14.497}{31.847} \times 100 \%$$

$$= 45,52 \%$$

Data PMKS

Tabel 4

PMKS/PPKS di Kabupaten Tanah Laut

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	
2	Anak Terlantar	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	47
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	298
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	4
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	14.312
9	Penyandang Disabilitas	3.049
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	60
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	43
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	63
22	Korban Bencana Sosial	59
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	13.737
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	49
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>31.847</b>

Di Kabupaten Tanah Laut tidak semua jenis PMKS tersebut dapat terlayani, hanya 10 jenis PMKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berikut jumlah PMKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2019 :

PMKS yang tertangani di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

**TABEL. 5**  
**KELOMPOK PMKS YANG TERTANGANI**

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	20
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	47
4	Lanjut Usia Terlantar	272
5	Penyandang Disabilitas	232
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemsayarakat (BWLP)	70
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	40
8	Korban Bencana Alam	18
9	Korban Bencana Sosial	59
10	Fakir Miskin	13.737
<b>TOTAL</b>		<b>14.497</b>

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disebutkan pula bahwa adanya keterbatasan sumber daya serta dana dalam menangani masalah PMKS, dengan demikian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Sosial tercermin program dan kegiatan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut, belum terlaksana sesuai dengan harapan, mengingat dana yang tersedia pada Dinas Sosial sangat terbatas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**BAB II**  
**ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD**

**2.2 Urusan Wajib**

Pembangunan Urusan Sosial diarahkan pada upaya peningkatan aksesibilitas penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan ketahanan sosial Individu, anak terlantar, lanjut usia terlantar,

gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, eks Napza, keluarga miskin, wanita rawan sosial, komunitas adat terpencil dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan jaminan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dalam rangka Pelaksanaan urusan wajib tentang pelayanan dasar pada Dinas sosial tentu tidak terlepas pada Program dan kegiatan dan tentunya dapat kita melihat kondisi secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar bermata pencaharian petani dan masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, lansia, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar , anak jalanan, gelandangan, pengemis , wanita rawan sosial dan kelompok rentan sosial lainnya serta meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, Orsos/LSM. Pemberdayaan dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan/ pelatihan keterampilan berusaha agar mampu dan mandiri.

Secara umum pelaksanaan pembangunan urusan sosial telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan kerukunan serta kedamaian antar umat beragama melalui forum dialog dan kerjasama dibidang sosial dan agama.

#### **a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan**

##### **► VISI DAN MISI DINAS SOSIAL**

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah ***Terwujudnya Tanah Laut yang***



***“Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.***

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Laut tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-5 yaitu : ***Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*** Selanjutnya penjabaran dari Misi 5 diatas dapat diuraikan dan sesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

**1. Membangun Sinergitas untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat.**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat khususnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Hal ini diharapkan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhiny akebutuhan dasar baik kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

## 2. Membangun Sinergitas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial juga harus membangun kerjasama yang baik dengan sesama pihak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

## 3. Membangun Sinergitas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PMKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi tentunya harus dimanfaatkan dalam sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PMKS, Sistem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan sistem teknologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan ***“Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”***.

Dengan indikator :

1. Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan.
2. Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.

Tabel 6

### Misi dan Tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No	Misi	Tujuan		Indikator/Tujuan Sasaran	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan
2	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	2	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan

#### ► STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada **4 (empat) strategi inti** yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : **pertama**, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar : **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.

#### **b. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 yang mengacu pada sasaran, dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

TABEL 7  
Program yang mengacu pada sasaran

No	Program/Sasaran/Kegiatan
1	<b>Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</b>
	<b>PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>
1.1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.2	Penunjang program keluarga harapan
1.3	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu
1.4	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin
	<b>PROGRAM 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>
2.1	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
2.2	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
2.3	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
	<b>PROGRAM 3 : Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>
3.1	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
3.2	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
	<b>PROGRAM 4 : Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>
4.1	Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar

No	Program/Sasaran/Kegiatan
<b>PROGRAM 5 : Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	
5.1	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>
<b>PROGRAM 6 : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	
6.1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
6.2	Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

#### c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 dapat dilihat pada (Lampiran)

#### d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Di Dinas Sosial :

##### 1) Permasalahan

- Kurangnya sarana penunjang operasional lapangan, sehingga penyelesaian pekerjaan di lapangan terlambat.
- Kurangnya staf di sekretariat (Perencanaan) dan bidang lingkup di Dinas Sosial, sehingga mengganggu rencana penjadwalan dari pelaksanaan program dan kegiatan.
- Regulasi yang selalu berubah dan perubahan yang terjadi antara sosialisasi dan pelaksanaan waktunya bersamaan.

##### 2) Solusi

- Meningkatkan sarana penunjang operasional lapangan.
- Mengusulkan penambahan staf sesuai dengan Analisa Jabatan yang telah disusun.
- Ada jeda waktu saat sosialisasi perubahan regulasi atau pun penerapan regulasi yang baru dengan waktu pelaksanaan regulasi tersebut.

#### 2. Urusan Pilihan (*SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

**3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** (*SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

**4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** (*SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- 1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi** *(SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).*
- 2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan**  
*(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).*

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **1. KERJASAMA DAERAH**

*(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).*

#### **2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

Untuk menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang cukup kompleks Dinas Sosial berkoordinasi dengan beberapa Instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, yaitu :

- ▶ Dinas Dukcapil  
Untuk Verifikasi dan Validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Keluarga Fakir Miskin dan Korban Bencana
- ▶ Dinas Kesehatan  
Untuk Menyediakan data Penerima Bantuan Iuran (PBI-APBD) / Jamkesda
- ▶ Polres Tanah Laut dan SatPol PP Tanah Laut  
Penanganan Orang Terlantar dan Gangguan Jiwa
- ▶ Bulog DivRe Kalsel  
Menyediakan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar berupa Pengadaan Beras untuk Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin, Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas
- ▶ BRI  
Untuk Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan)
- ▶ Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum  
Penanganan Orang dan Gangguan Jiwa
- ▶ Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “Budi Sejahtera” Banjarbaru  
Penanganan Lansia dalam Panti
- ▶ Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Budi Satria” Banjarbaru  
Penanganan anak remaja putus sekolah dalam Panti
- ▶ Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) “Melati” Banjarbaru  
Penanganan WRSW (wanita rawan sosial ekonomi) dalam Panti
- ▶ Panti Sosial Anak Asuhan (PSAA) “Budi Mulia” Banjarbaru  
Penanganan Anak Yatim dan anak terlantar
- ▶ Panti Sosial Tuna Netra “Fajar Harapan” Martapura  
Penanganan Penyandang Cacat Netra dalam Panti



**3. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

*(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).*

**4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Dinas Sosial melaksanakan Penanggulangan bencana pada waktu “Pasca Bencana” berupa pendampingan warga terdampak bencana dan memfasilitasi Bantuan Sosial Tidak Terencana

**5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

*(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).*

**BAB V**  
**PENUTUP**

**1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dalam Tahun Anggaran 2019 ini menyusun LKPJ yng mana nomenklturnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut serta Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut.

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : **“Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**. maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut

TABEL8  
PELAYANAN PMKS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

<b>N o</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Pelayanan yang diberikan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1	Rehabilitasi Sosial	- Anak Terlantar	Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyandang Disabilitas	- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas - Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Keluarga bermasalah sosial psikologis	Konseling Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial

		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Seksi rehabilitasi Sosial
		- ODHA HIV/Aids	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyalahgunaan NAPZA	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
2	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
		- Orang Terlantar, Orang Gangguan Jiwa, Eks Narapidana dan Mayat Terlantar	Shelter di rumah perlindungan sosial dan rujukan	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
3	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	- Bantuan Stimulan, Pendampingan  - Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
		- Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan	Pemeliharaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Basis Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS - Data PBI - Data penerima KKS	Verifikasi dan Validasi Data BDT, Data PMKS, Data PBI dan Data Penerima KKS	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
6	Bantuan Sosial	- Lansia Terlantar - Fakir Miskin - Penyandang Disabilitas Berat	Verval data penerima bansos dan identifikasi kebutuhan bantuan	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar urusan sosial meliputi 10 program dan 29 kegiatan, untuk urusan tugas pembantuan SKPD dinas sosial tidak melaksanakan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan terkait dengan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

## 2. Saran-Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penanganan PMKS ;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat, dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerja.
3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

## 3. KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

a. Prestasi yang dicapai SKPD *(tidak ada)*

b. Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan Dinas Sosial sebagai berikut :

### 1. PSM

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Prestasi              | : PSM Berprestasi             |
| 2. Nama yang berprestasi      | : ERNA EVA                    |
| 3. Instansi Penyelenggara     | : Dinas Sosial Prov.Kal-Sel   |
| 4. Peringkat dalam perlombaan | : Kategori terbaik Tk.Kal-Sel |

## 2. PKH

1. Nama Penghargaan : Pelaksanaan PKH Tingkat Nasional Tahun 2019
2. Nama yang berprestasi : PKH Tanah Laut
3. Instansi Penyelenggara : Kementerian Sosial RI
4. Peringkat dalam perlombaan : Peringkat 5 Kabupaten Terbaik dalam Pelaksanaan PKH Tingkat Nasional Tahun 2019

## 3. PKH

1. Nama Penghargaan : Award dari BPPKS Regional Kalimantan sebagai SDM PKH terbanyak mendapatkan penghargaan dalam Diklat FDS 2019
2. Nama yang berprestasi : 1.Akhmad Rahman H  
2. Hayatul Mursyida  
3. Nahrul R  
4. Alfiannor  
5. Nita Dwi Susanti  
6. Mirna  
7. Dwi Styana
3. Instansi Penyelenggara : BPPKS Regional Kalimantan

## 4. PKH

1. Nama Penghargaan : Jambore PKH Provinsi Kalimantan Selatan
2. Nama yang berprestasi : PKH Tanah Laut
3. Instansi Penyelenggara : Dinas Sosial Prov.Kal-Sel
4. Peringkat dalam perlombaan : Juara Umum Jambore PKH

# LAMPIRAN



**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{524}{17.361} \times 100\%$	3,02 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{77}{122} \times 100\%$	63,11 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial

		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	<p>Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</p> <p>----- x100%</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng</p>	0	0 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga</p>	$\frac{30}{35} \times 100\%$	85,71 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<p>Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang</p>	$\frac{113}{524} \times 100\%$	21,56 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial



				dibina			
--	--	--	--	--------	--	--	--